

# ASEAN DEFENSE INDUSTRIAL COLLABORATION (ADIC) SEBAGAI MEDIA DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA ANGGOTA ASEAN

## ASEAN DEFENSE INDUSTRY COLLABORATION (ADIC) AS MEDIUM OF DEFENSE DIPLOMACY OF ASEAN MEMBER COUNTRIES

Zulfikar Dilahwangsa<sup>1</sup>, Ikrar Nusa Bhakti<sup>2</sup>, Rodon Pedrason<sup>3</sup>

Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

(dilahwangszulfikar@gmail.com)

**Abstrak** -- ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC) dibentuk untuk menciptakan lingkungan keamanan dan pertahanan yang lebih komprehensif dan konsolidatif di Asia Tenggara. Keberadaan ADIC diekspektasikan memberikan keuntungan ekonomi sekaligus keuntungan strategis bagi negara ASEAN. Sebagai bentuk kegiatan diplomasi pertahanan, implementasi ADIC dipengaruhi oleh dinamika keamanan di Asia Tenggara. Tulisan ini menganalisis peran ADIC sebagai media diplomasi negara ASEAN dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh negara ASEAN dalam implementasi ADIC. Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan dan data yang telah diolah pada penelitian yang terkait. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ADIC menjadi katalis dari pembentukan usaha pembentukan *confidence building measure*, sebagai wadah untuk penyamaan persepsi atas urgensi kemandirian industri pertahanan regional, mengurangi potensi terjadinya dilema keamanan atas tindakan peningkatan kapasitas militer, dan sekaligus ADIC berkontribusi pada perimbangan kekuatan ASEAN sebagai organisasi regional (*institutional balancing*). Kendala dalam implementasi ADIC adalah belum terbentuknya kepercayaan (*confidence*) yang kuat antar negara anggota ASEAN, disparitas perkembangan industri pertahanan antar negara anggota, dan kebiasaan dalam mengimpor alat pertahanan.

**Kata kunci** : ASEAN Defense Industry Collaboration, diplomasi pertahanan, industri pertahanan, regional security complex

**Abstract** -- ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC) was established to create comprehensive and consolidated security and defense environment in Southeast Asia. The existence of ADIC is expected to bring economic as well as strategic advantages. As a form of defense diplomacy, the implementation of ADIC is influenced by the dynamic in security in Southeast Asian. This research aims to explore the roles of ADIC as a medium of defense diplomacy of ASEAN countries and to identify the challenges in implementing the ADIC framework. The data analysed in this research consist of primary data collected through interviews, and secondary data collected from reports and past studies, using a qualitative analysis. The findings of this research indicate that ADIC serves as a catalyst in creating a confidence-building measure, to equate the urgency of regional defense industry independent, to lessen the possibility of security dilemma that is caused by the military modernization, and to contribute to power

---

<sup>1</sup> Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

balancing as a regional organization (institutional balancing). The challenges in implementing ADIC include inadequate level of confidence among member countries, disparity of defence industry development, and tendency to buy defence equipment from overseas (non-member ASEAN countries).

**Keyword: ASEAN Defence Industry Collaboration, defense diplomacy, defense industry, regional security complex**

## Pendahuluan

Berakhirnya Perang Dingin membuka babak baru diskursus mengenai keamanan regional<sup>4</sup>. Dalam perpektif keamanan regional, akhir dari Perang Dingin memiliki tiga signifikansi. Pertama, memindahkan fokus keamanan negara adidaya dari daratan Eropa kepada wilayah Asia. Kedua, intensitas dan sifat penetrasi kekuatan negara adidaya berubah sejalan dengan tidak adanya konfrontasi pada tataran ideologis. Amerika Serikat semakin leluasa dalam menanamkan pengaruhnya secara ideologi dan ekonomi dengan negara lain dibanding pada masa Perang Dingin. Ketiga, akhir Perang Dingin mengubah sifat dari agenda keamanan yang sebelumnya hanya berfokus pada isu militer menjadi lebih luas pada isu dan aktor non-militer (Buzan & Weaver, 2003).<sup>5</sup>

Dilihat dari perspektif negara pinggir (*periphery*), perkembangan ini berarti bahwa negara pusat (*core*) semakin kohesif dan sistem internasional lebih mengarah pada struktur hierarkis. Perkembangan seperti ini membuat beberapa negara merasa terancam dengan hegemoni Amerika Serikat. Negara yang merasa terancam ini kemudian merumuskan kebijakan luar negeri lebih mendukung struktur kekuatan global yang multipolar, bukan unipolar dengan Amerika Serikat sebagai pusatnya. Kebijakan luar negeri seperti ini dapat dilihat pada kebijakan luar negeri Cina, India, Rusia, Iran, Brasil, Perancis, dan termasuk Indonesia (Buzan & Weaver, 2003).<sup>6</sup>

Pembahasan mengenai hegemoni erat kaitannya dengan konsep kekuatan (*power*). Negara yang dikatakan sebagai

---

<sup>4</sup>Buzan membagi fase keamanan regional menjadi tiga fase. Fase pertama yaitu fase era modern pada era 1500-1945, fase perang Dingin dari tahun 1945-1989, dan fase pasca Perang Dingin dari tahun 1990-sekarang.

<sup>5</sup> Buzan, B., & Weaver, O. *Regions and Power: The Structure of International Security*, (New York: Cambridge University Press, 2003)

<sup>6</sup> *Ibid.*

hegemon dapat dipastikan memiliki *power* yang besar. Neuman (2009)<sup>7</sup> menjelaskan bahwa *power* adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain untuk berperilaku sesuai dan konsisten dengan kepentingan dan tujuan negaranya. Pengaruh (*influence*) dalam hal ini diartikan sebagai suatu instrumen untuk membujuk, mengajak, atau mendesak negara lain. Semakin besar kemampuan suatu negara untuk memberikan hukuman (*punishment*), maka semakin besar pula kekuatan dan pengaruhnya. Namun efektif atau tidaknya kapasitas suatu negara yang diwujudkan sebagai alat kebijakan (*policy tool*) tergantung pada keretanan (*vulnerability*) negara lain terhadap kekuatan negara tersebut.

Secara lebih spesifik, Neuman (2009) menjelaskan bahwa kemampuan untuk mempengaruhi bukan terletak pada seberapa besar luas wilayah, kekayaan, atau kemampuan militer yang dimiliki. Namun terletak pada bagaimana suatu negara memanfaatkan preferensi, kebutuhan atau kekurangan yang dimiliki

negara lain<sup>8</sup>. Ketika tidak ada pilihan lain, dan memilih untuk tidak bekerja sama sangat beresiko, maka suatu negara akan cenderung untuk mengikuti keinginan negara yang lebih kuat. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apa indikator dari kekuatan dan pengaruh suatu negara?

Neuman menjelaskan sebagai berikut:

*“...It is posited here that the global defense-industrial sector is a remarkably accurate indicator of the stratification of power in the post cold-war international system. As in overall system, the United States plays the dominant role in the defense sector as well. Its comparative advantage use by U.S. policymakers to influence the foreign policy behavior of other states...”* (Neuman, 2009).<sup>9</sup>

Indikator dari stratifikasi kekuatan dan pengaruh dalam sistem internasional yang akurat adalah sektor industri pertahanan. Amerika Serikat menggunakan kemajuan yang dimiliki pada sektor industri pertahanan sebagai alat diplomasi untuk mencapai kepentingannya terhadap negara lain. Industri pertahanan yang maju memberikan keunggulan

---

<sup>7</sup> Neuman, S. G. *Power, Influence, and Hierarchu: Defense Industry in a Unipolar World*. Dalam R. A. Bitzinger, *The Modern Defense Industri: Political, Economic, and Technological Issues*, (California: ABC-CLIO, 2009), p. 61-94.

<sup>8</sup> Namun hal ini sangat bergantung pada konteks, sebab suatu pemerintahan tidak terlalu berpengaruh terhadap tekanan eksternal jika terdapat sumber bantuan alternatif.

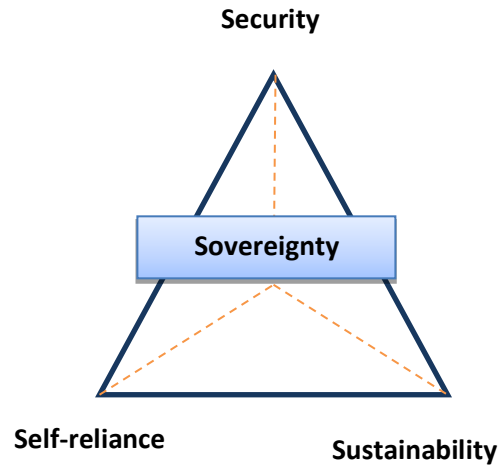
<sup>9</sup>Neuman, S. G., *Loc. Cit.*

komparatif bagi pengambil kebijakan di Amerika Serikat untuk mempengaruhi kebijakan negara lain.

Restrukturisasi dan konsolidasi industri pertahanan juga terjadi di negara Eropa. Ketika anggaran pertahanan diturunkan, perusahaan dan negara berusaha lebih untuk mengekspor persenjataan di luar wilayah mereka, utamanya ke negara-negara berkembang (Dunne, 2009, hal. 12).<sup>10</sup>

Berbeda dengan negara maju, industri pertahanan di negara berkembang masih banyak berada di sektor publik<sup>11</sup>. Pertimbangan utamanya ada tiga, yaitu anggapan bahwa industri pertahanan berkaitan dengan masalah strategis, pertimbangan politik, dan pertimbangan militer. Pertimbangan-pertimbangan ini menjadi alasan mengapa industri pertahanan di negara berkembang masih berada di sektor publik. Dengan begini, industri pertahanan di negara berkembang

jauh dari bahaya kolusif yang dijelaskan oleh Eisenhower dengan istilah *military-industrial complex*<sup>12</sup>.



**Gambar 1.** Segitiga Emas Kedaulatan Nasional  
Sumber: Ron Matthews dan Curie Maharani, 2009, *The Defense Iron Triangle Revisited*

Negara berkembang sebagian besar merupakan negara yang baru merdeka. Untuk negara yang baru berkembang, pertahanan dan keamanan kemudian menjadi prioritas utama, pembangunan negara harus dijaga. Terlebih lagi, untuk negara yang baru merdeka ini, untuk menikmati kemerdekaan, mereka juga harus memiliki pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan

<sup>10</sup> Dunne, J. P. *Development in the Global Arms Industry from the End of the Cold War to mid-2000s*. Dalam R. A. Bitzinger, *The Modern Defense Industry*, (California: ABC-CLIO, LLC., 2009) hlm. 12.

<sup>11</sup>Di negara berkembang, industri pertahanan masih banyak berada di sektor publik, sedangkan di negara yang telah mau, privatisasi telah banyak dilakukan.

<sup>12</sup>*Military-industrial complex* pertama kali digunakan oleh President Eisenhower untuk menjelaskan relasi antara industri pertahanan dengan pemerintah Amerika Serikat semasa Perang Dingin. Istilah ini merujuk pada keadaan dimana terjadi peningkatan atas pembelanjaan militer secara terus-menerus akibat dari lobi kontraktor industri pertahanan terhadap pemerintahan suatu negara.

berkelanjutan memerlukan bantuan dana dari negara lain, utamanya dalam bentuk *Foreign Direct Investment*, dan agar negara lain dapat memberikan bantuannya, stabilitas perekonomian domestik suatu negara harus terjamin. Stabilitas perekonomian dapat dicapai jika negara tersebut mampu memberikan jaminan keamanan untuk aktivitas ekonomi di dalam negara. Hal inilah yang disebut dengan segitiga emas kedaulatan negara. Untuk mencapai kedaulatan penuh, negara baru mengusahakan dimensi keamanan (*security*), kemandirian (*self-reliance*), dan pembangunan berkelanjutan (*sustainability*) di dalam negaranya (Matthews & Maharani, 2009, hal. 40)<sup>13</sup>

Sampai pada saat ini, industri militer masih menjadi tujuan yang prinsipil untuk negara berkembang. Bukan hanya karena negara berkembang berada di wilayah yang memiliki ketegangan yang tinggi (*region with high tension*), namun juga karena negara berkembang menjadi subjek terhadap ancaman konflik dan kemungkinan embargo persenjataan. Sebagai contoh, India dan Pakistan

mendapat embargo militer dari Amerika Serikat dan Uni Eropa ketika terjadi konflik senjata di antara mereka, kemudian Afrika Selatan yang mendapat embargo dari PBB karena kasus pembantaian Sharpeville yang terjadi pada Maret 1960, dan kasus Tiananmen yang membuat Cina mendapatkan embargo dari NATO dan Eropa (Matthews & Maharani, 2009, hal. 40).<sup>14</sup>

Secara lebih mendetail, Bitzinger menjelaskan bahwa terdapat dua perspektif yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu negara mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya. Perspektif pertama adalah perspektif strategis. Pandangan strategis mencakup alasan suplai keamanan yang menyatakan bahwa suplai persenjataan yang paling aman adalah suplai dari dalam negeri. Sejalan dengan alasan pertama, suplai dalam negeri pada prosesnya akan mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap negara lain dalam persenjataan. Selain itu, pertimbangan *national pride*. Industri pertahanan yang baik menjadi bagian dari

---

<sup>13</sup> Matthews, R., & Maharani, C. *The Defense Iron Triangle Revisited*. Dalam R. Bitzinger, *The Modern*

*Defense Industry*, (California: ABC-CLIO, 2009), hlm. 48-59.

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 40.

kekuatan nasional. Pengembangan industri pertahanan juga dapat menjadi kompensasi atas kekurangan yang dimiliki suatu negara<sup>15</sup> (Bitzinger, 2013).<sup>16</sup>

Perspektif kedua berkaitan dengan dimensi ekonomi. Pengembangan industri pertahanan dirasionalisasikan menjadi ujung tombak dalam pengembangan, ekspansi, dan modernisasi industri-industri yang menjadi industri pendukung industri pertahanan. Produksi persenjataan juga dapat berfungsi sebagai lokomotif dalam hal pengembangan teknologi yang menggerakkan lahirnya industri baru, terutama pada teknologi kedirgantaraan dan teknologi komunikasi (Bitzinger, 2013).

<sup>17</sup>

Diskursus mengenai pengembangan industri pertahanan tidak terlepas dari pembahasan tentang belanja militer (*military spending*). Pada level regional ASEAN, terjadi peningkatan belanja militer yang signifikan. Belanja militer Malaysia meningkat dari 1.7 miliar dollar pada tahun 2000 menjadi 3.5 miliar

dollar pada tahun 2008. Di Singapura, belanja militer meningkat 26 persen dari 4.6 miliar dollar pada tahun 2000 menjadi 5.8 miliar dollar di tahun 2008. Di Indonesia sendiri, belanja militer meningkat signifikan sebanyak 72 persen, dari 2.2 miliar dollar pada tahun 2000 menjadi 3.8 miliar pada tahun 2008. Secara umum, belanja militer di Asia Tenggara meningkat sebesar 50 persen dari tahun 2000 sampai pada tahun 2008 (Widjayanto, Prasetyo, & Keliat, 2012, hal. 11-12).<sup>18</sup> Belanja militer terbesar umumnya dialokasikan untuk pembelian atau produksi alat utama sistem pertahanan (alutsista), termasuk perawatan dari alutsista yang telah dimiliki.

Industri pertahanan merupakan komponen vital dari kemampuan pertahanan sebuah negara. Hal ini dikarenakan industri pertahanan yang kuat memiliki dua implikasi, yakni implikasi terhadap kemampuan kekuatan pertahanan dan implikasi terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi

---

<sup>15</sup> Contoh konkritnya adalah Singapore. Membangun industri pertahanan sebagai kompensasi atas wilayahnya yang kecil dan rentan (*midget psychosis*).

<sup>16</sup>Bitzinger, R. A. "Revisiting Armaments Production in Southeast Asia: New Dreams, Same

Challenges". *Contemporary Southeast Asia*, 35, 369-394. 2013.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup>Widjayanto, A., Prasetyo, E., & Keliat, M. *Dinamika Persenjataan dan Revitalisasi Industri Pertahanan*, (Jakarta: UI-Press, 2012), p. 11-12.

nasional (Hartanto, 2013, hal. 22).<sup>19</sup> Dalam hal pengadaan alutsista, alutsista yang dapat diproduksi dalam negeri tidak selamanya mendapatkan skala ekonomi. Permasalahan tentang skala ekonomi ini yang menjadi hambatan dalam produksi alutsista dalam negeri dapat dikurangi dengan kerjasama dalam industri pertahanan (Hartanto, 2013, hal. 33).<sup>20</sup>

Negara anggota ASEAN merupakan *net-purchaser* atas peralatan militer dari negara-negara yang memiliki industri pertahanan yang maju. Hal ini juga kemudian didukung oleh semakin meningkatnya anggaran pertahanan negara ASEAN. Agar anggaran persenjataan yang meningkat tersebut tidak mengalir ke negara selain negara ASEAN lain yang memiliki kemampuan memproduksi alutsista, maka diperlukan suatu mekanisme agar negara ASEAN dapat saling membantu dalam mengembangkan industri pertahanannya. Mekanisme ini juga akan dibutuhkan untuk membantu negara ASEAN mengurangi dependensi persenjataan yang memiliki

resiko embargo. Berangkat dari hal ini, *ASEAN Defense Industrial Collaboration* (ADIC) dibentuk (Tomotaka, 2013).<sup>21</sup>

Gagasan tentang kolaborasi industri pertahanan pertama kali didiskusikan pada *ASEAN Defense Ministerial Meeting* (ADMM) yang ke-empat di Hanoi. Proposal pembentukan yang diinisiasi oleh Malaysia ini lahir dari realitas bahwa negara-negara ASEAN adalah *net purchaser* atas peralatan militer dan juga mengingat industri pertahanan di beberapa negara ASEAN berkembang secara signifikan. Pada pertemuan ADMM kelima, *concept paper* ADIC kemudian diadopsi oleh negara-negara ASEAN (Tomotaka, 2013).<sup>22</sup>

Adapun tujuan dari pembentukan ADIC dapat dilihat sebagai berikut:

*ADIC was established to enhance defence industrial inter-dependence within ASEAN and thereby to foster indigenisation and technological independence when it comes to local armaments production. ASEAN currently procures almost 90 per cent of its defence products and services from overseas suppliers, mainly the United States and*

---

<sup>19</sup>Hartanto, A. *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2013) hlm. 22.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 33.

<sup>21</sup> Tomotaka, S. *ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) and ADMM Plus*, Desember 2013.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Western Europe (Balakrishnan & Bitzinger, 2012).<sup>23</sup>

Pembentukan ADIC diekspektasikan dapat melengkapi usaha *Confidence Building Measure* (CBM) dan berkontribusi dalam usaha menciptakan perdamaian dan stabilitas regional. Berdasarkan atas hal ini, ADIC dapat memiliki tujuan sebagai berikut: (1) berkolaborasi dalam produk yang sama melalui *partnership*, *joint venture*, dan *co-production*, serta melihat prospek terciptanya skala ekonomi (*economic scale*) pada bentuk kolaborasi ini, (2) mempromosikan *intra-trade* ASEAN dalam hal produk dan servis hasil sektor industri pertahanan ASEAN, (3) mendukung negara anggota ASEAN dalam pameran dagang dan pertunjukan di sektor pertahanan, (4) meningkatkan teknologi dan tingkat kompetisi industri dalam pertahanan dan industri *dual-use*, (5) memberikan insentif yang akan memberi bantuan pada pertumbuhan industri pertahanan di ASEAN (ASEAN Defense Minister's Meeting, 2011).<sup>24</sup>

Dengan semua lingkup kegiatan yang dimiliki oleh ADIC, diekspektasikan bahwa kolaborasi industri pertahanan ini akan mereduksi impor pertahanan di negara anggota ASEAN dari 25 milyar dollar AS menjadi 12.5 milyar dollar AS secara akumulatif (Santosa, 2011).<sup>25</sup>

Sejak dibentuknya APSC di bawah Bali Concord II di tahun 2003, kerjasama pertahanan di dalam ASEAN berkembang secara signifikan. Kerjasama regional dan multilateral semakin banyak dirumuskan dan diimplementasikan di ASEAN. Komitmen kuat negara ASEAN untuk bekerja sama dalam kerangka multilateral ditandai dengan dibentuknya ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM). Salah satu dari empat agenda dalam ADMM berfokus pada pengembangan industri pertahanan. Langkah konkrit dari pengembangan industri pertahanan negara ASEAN adalah dengan diinisiasinya pembentukan ADIC.

ADIC merupakan salah satu dari sekian banyak kerjasama di antara negara anggota ASEAN. Kerjasama-kerjasama

---

<sup>23</sup>Balakrishnan, K., & Bitzinger, R. A. *ASEAN Defense Industrial Collaboration: Getting to Yes*, (Singapore: Rajaratnam School of International Studies, 2012).

<sup>24</sup> ASEAN Defense Minister's Meeting. *ASEAN Defence Ministers' Meeting: Concept Paper on Establishing ASEAN Defence Industry*, April 2011.

<sup>25</sup> Santosa, I. N. *Malaysia, Indonesia pace ASEAN military industry*, Mei 2011.



dalam sektor pertahanan disadari memiliki signifikansi masing-masing dalam mendemonstrasikan komitmen negara anggota dalam kerjasama multilateral. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk menganalisis signifikansi ADIC secara khusus dalam isu kerjasama pertahanan antar negara anggota ASEAN dalam perspektif diplomasi pertahanan. Tulisan ini akan membahas bagaimana peran *ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC)* sebagai media Diplomasi Pertahanan Negara Anggota ASEAN dari tahun 2011 sampai pada tahun 2016 dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh negara ASEAN dalam *ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC)*.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana *ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC)* dapat menjadi media diplomasi pertahanan Indonesia dan bagaimana upaya Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional melalui Diplomasi Pertahanan dalam *ASEAN Defense Industrial*

*Collaboration (ADIC)*, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang menjelaskan suatu kejadian dengan apa adanya. Penelitian jenis ini melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pendapat orang atas sebuah topik atau isu (Sutanto, 2013, hal. 99).<sup>26</sup>

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan hal tersebut, informan yang menjadi data primer adalah representasi institusi yang dapat berupa individu yang pernah atau sedang terlibat dalam ADIC, para akademisi yang mengetahui secara mendalam tentang isu kerjasama industri pertahanan secara umum dan ADIC secara khusus. . Dalam penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa instansi yang terkait dengan *ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC)*, seperti Kementerian Pertahanan Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, KKIP, dan Sekretariat ASEAN.

---

<sup>26</sup> Sutanto, L. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).

Subjek penelitian adalah orang-orang yang secara langsung terlibat sebagai narasumber atau pengerti data. Subjek penelitian sebagai contoh adalah pihak yang diwawancarai, pihak yang mengisi kuesioner, atau orang yang ikut berpartisipasi dalam percobaan yang dilakukan atau diobservasi (Universitas Pertahanan Indonesia, 2014, hal. 22). Penelitian yang menggunakan *purposive sampling* ini mengutamakan wawancara sehingga subjek penelitian akan didokumentasikan dalam bentuk transkrip.

Adapun subjek penelitian dalam topik ini adalah:

- 1) Kementerian Pertahanan
  - a) Direktur Kerjasama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan
  - b) Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan

- 2) *Security Cooperation Division/Political Security Directorate of ASEAN Secretariate*

- 3) Kedutaan Besar

- a) *Defense Attache of Royal Thai Embassy for Indonesia (GP.Capt. Prapas Sornchaidee)*

- b) *Defense Attache The Republic of Singapore for Indonesia (Col. Lam Chee Yuong)*

- c) *Defense Attache of The Socialist Republic of Vietnam for Indoneisa (Col. Phung Quang Tao)*

- d) *Defense Attache of Cambodia for Indonesia*

- 4) Praktisi dan Akademisi

- a) Purnomo Yusgiantoro: Mantan Menteri Pertahanan RI (menteri yang menjabat ketika ADIC dicanangkan).

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam memilih informan. Seperti yang dijelaskan oleh Wahyuni (2011, hal. 33) <sup>27</sup>bahwa *purposive sampling* merupakan strategi yang umumnya digunakan untuk memilih informan berdasarkan kriteria awal yang

---

<sup>27</sup>Wahyuni, S. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011).

telah ditetapkan sebelumnya. Besarnya sample atau informan dalam metode ini ditentukan oleh tingkat kejenuhan data yaitu ketika data yang didapatkan tidak memberikan informasi baru yang berhubungan dengan topik penelitian. Adapun kriteria yang digunakan oleh peneliti dalam memilih narasumber adalah:

1. Mereka yang mengikuti proses diplomasi pertahanan Indonesia di ADIC;
2. Mereka yang menguasai atau memahami ADIC;
3. Mereka yang berkecimpung atau terlibat pada penelitian ADIC
4. Mereka yang menyampaikan informasi tanpa mengemasnya terlebih dahulu dengan versinya.

Proses pengumpulan data dapat dilakukan bersamaan dengan analisis data kualitatif. Untuk mengumpulkan data, mengelola, dan akhirnya menarik kesimpulan, peneliti menggunakan model teknik analisis data Miles dan Haberman. Seperti yang dikutip dalam Basrowi dan Suwandi (Basrowi & Suwandi, 2008, hal. 209),<sup>28</sup> analisis Miles dan Haberman

mencakup tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi).

### **Pembahasan**

ADIC merupakan kerangka kerjasama praktis yang dibentuk di bawah ASEAN *Defense Ministerial Meeting (ADMM)*. ADMM sendiri dibentuk di bawah pilar ASEAN *Political Security Community (APSC)* pada tahun 2006 silam. ADMM dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan dialog tentang pertahanan dan keamanan dalam usaha mewujudkan Komunitas Keamanan ASEAN. Enam tahun setelah terbentuk, ADMM telah berkembang sebagai suatu mekanisme yang solid sebagai wadah praktek kerjasama multilateral pertahanan dan militer dalam ASEAN. ADMM telah membawa negara anggota ASEAN pada suatu level kepercayaan yang memungkinkan sektor pertahanan dan militer negara anggota untuk bekerja sama dalam tataran praktis. Salah satu kerjasama dalam tataran praktis ini adalah ASEAN

---

<sup>28</sup> Basrowi, & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

*Defence Industry Collaboration* (ASEAN, 2012, hal. 30).<sup>29</sup>

Pada tahun 2011, menteri pertahanan ASEAN sepakat untuk mempromosikan lima area kerjasama yang terdiri atas keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan kebencanaan, operasi perdamaian, *counter terrorism*, dan *military medicine*. Setelah pertemuan pada bulan Februari, para menteri pertahanan ASEAN juga sepakat untuk mengadopsi *concept paper* yang diajukan oleh Malaysia pada bulan Mei di tahun yang sama. *Concept paper* yang disetujui ini menginisiasi terbentuknya *ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC)*. Kerangka kerjasama ADIC diharapkan mampu untuk mereduksi biaya impor alat-alat pertahanan negara anggota ASEAN dari 25 milyar dollar atau

sekitar sekitar 332 triliun rupiah menjadi setengahnya, 12.5 milyar dollar (CSIS, 2011).

<sup>30</sup>

Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, ADIC telah melakukan lima pertemuan. Pertemuan-pertemuan tersebut dilaksanakan untuk mengfinalisasikan kerangka kerjasama dalam sektor industri pertahanan negara ASEAN. Barulah pada Januari 2016, tepatnya pada workshop ADIC yang keempat (4<sup>th</sup> ADIC Workshop) yang dirangkaikan dengan pertemuan Consultative Group ADIC yang pertama (1<sup>st</sup> Consultative Group Meeting of ADIC), kerangka kerjasama dalam ADIC telah mencapai tahap final.

**Tabel 1.** Daftar Pertemuan ADIC tahun 2011-2016

TANGGAL	NAMA PERTEMUAN	KONTEN PERTEMUAN	TEMPAT
10 MEI 2011	ADSOM Working Group Workshop on The ASEAN Defense Industry Collaboration	Penginisiasian <i>concept paper</i> ADIC	Kuala Lumpur, Malaysia

<sup>29</sup> ASEAN, *ASEAN Annual Report 2011-2012: Evolving Toward ASEAN 2015*, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2012).

<sup>30</sup> CSIS, *ASEAN Defense Industri Collaboration*, Juli 2011.

<b>18 APRIL 2012</b>	1 <sup>st</sup> Workshop on ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC)	Pendekatan strategis dalam pengembangan Concept Paper ADIC	Kuala Lumpur, Malaysia
<b>30 MARET 2013</b>	2 <sup>nd</sup> Workshop on ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC)	Pembahasan lebih lanjut tentang inisiasi ADIC	Langkawi, Malaysia
<b>24 – 25 APRIL 2014</b>	3 <sup>rd</sup> Workshop on ASEAN Defense Industry Collaboration	Pembahasan Framework of Implementation dari ADIC	Nay Pyi Taw, Myanmar
<b>17 – 21 MARET 2015</b>	ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC) Networking Program		Langkawi, Malaysia.
<b>26 – 29 JANUARI 2016</b>	1 <sup>st</sup> Consultative Group of ASEAN Defence Industry Collaboration (ADIC) and 4th ADIC Workshop	Finalisasi Framework of Implementation	Vientiane, Laos

Sumber: Diolah oleh penulis, 2019

### **ASEAN Defence Industry Collaboration Sebagai Media Diplomasi Pertahanan Negara-negara ASEAN**

Cotter dan Foster (2004) menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan dapat diartikan sebagai penggunaan angkatan

bersenjata dan infrastruktur terkait (utamanya Kementerian Pertahanan) sebagai instrumen kerjasama. Kerjasama ini dilaksanakan di masa damai dan ditujukan sebagai sarana dalam mencapai kepentingan keamanan dan kebijakan luar

negeri suatu negara. Dalam kolaborasi industri pertahanan ini, kementerian pertahanan di masing-masing negara menjadi *leading sector*. Di Indonesia sendiri, implementasi ADIC berada di bawah Direktorat Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan.

Mengutip pendapat Pedrason (2015), diplomasi pertahanan merupakan metode dan segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya yang mungkin sedang dalam suasana kompetisi yang bertujuan membentuk hubungan kemitraan, kerjasama, dan yang terpenting, untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya.

Sejak dibentuk pada tahun 1967, ASEAN telah mengalami transformasi. Kerjasama telah banyak diinisiasikan oleh negara anggota, agenda keamanan yang sebelumnya banyak lebih nyaman dikomunikasikan secara bilateral, kini sudah masuk dalam ranah multilateral, dan berbagai forum dan komunitas telah dibentuk dengan tujuan untuk semakin menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang semakin terintegrasi. Hubungan kerjasama yang disebut sebagai *Amity* dalam kacamata *regional security*

*complex* di ASEAN semakin meluas sekaligus mendalam.

Namun hubungan antar negara ASEAN tidak selamanya mulus. Di beberapa peristiwa yang umumnya berhubungan dengan masalah perbatasan dan wilayah kedaulatan menunjukkan bahwa potensi konflik di ASEAN tidak semerta-merta hilang dengan semakin integrasinya negara ASEAN di bidang ekonomi, politik keamanan, dan sosial budaya. Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang sempat berekskalasi sampai kepada konflik bersenjata terbatas merupakan bukti dari masih kuatnya potensi konflik di kawasan ini.

Derajat tertinggi kerjasama antar negara adalah ketika dua negara atau lebih bekerja sama dalam ranah keamanan. Perspektik neo-realis mengkategorikan isu keamanan ke dalam isu *high-politics*. Kerjasama dalam bidang keamanan tidak serta merta langsung dapat terjadi. Hal ini dikarenakan isu keamanan adalah isu yang sensitif, dan diperlukan derajat kepercayaan (*confidence*) tertentu sehingga suatu negara dapat bekerja sama dalam ranah ini. Kerjasama industri pertahanan dapat dikatakan sebagai

kerjasama di bidang keamanan. Hal ini dikarenakan industri pertahanan suatu negara berkontribusi secara signifikan dalam membentuk kapasitas pertahanan suatu negara.

*ASEAN Defense Industry Collaboration* merupakan suatu hasil (*results*) sekaligus jalan (*ways*) dalam membentuk *confidence* di antara negara ASEAN. ADMM yang memayungi ASEAN baru terbentuk pada tahun 2006. ADMM ini sendiri merupakan forum konsultatif untuk isu pertahanan dan keamanan di Asia Tenggara yang bersifat multilateral. Isu keamanan memang telah mulai muncul dalam agenda pembahasan di ASEAN, namun sebelum ADMM dibentuk, isu keamanan dibahas dalam ranah bilateral. ASEAN di masa-masa awal pembentukan bahkan sangat berhati-hati dalam menggunakan terminologi keamanan, namun saat ini terminologi dan isu keamanan hampir selalu masuk dalam setiap pertemuan pejabat tinggi negara anggota ASEAN.

Di sini dapat dilihat bahwa CBM di ASEAN telah terjadi jauh sebelum terbentuknya ADMM. Negara ASEAN tidak sungkan lagi untuk membawa agenda

keamanan dalam ranah kerjasama multilateral. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama negara ASEAN dalam ADIC merupakan hasil *Confidence Building* di Asia Tenggara yang berlangsung puluhan tahun lamanya. Kepercayaan antar negara anggota ASEAN terbentuk tidak hanya melalui kerjasama di bidang militer, namun juga di bidang ekonomi dan sosial. Namun perbedaannya, kerjasama di bidang militer diawali pada tataran bilateral. Kerjasama dalam tataran multilateral baru dibenarkan setelah ADMM dibentuk. Pada intinya, CBM yang bertahun-tahun menghasilkan ADMM, dan ketika ADMM dibentuk, forum ini menjadi katalis bagi negara anggota ASEAN untuk lebih terintegrasi lagi dalam kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan pada tataran multilateral.

Dibentuk pada tahun 2011, ADIC telah melakukan pertemuan enam (6) kali sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Di tahun 2016, ADIC tekah mengfinalisasikan kerangka kerjasama. Sebagai sebuah kolaborasi industri pertahanan, memproduksi suatu produk pertahanan asli ASEAN adalah tujuan yang ingin dicapai. Sampai saat ini, belum ada

*tangible product* yang dihasilkan dari kerjasama ini.

Namun, keberhasilan kolaborasi industri pertahanan ASEAN ini tidak hanya dilihat dari ada tidaknya *tangible asset*. Kepercayaan antar negara ASEAN untuk saling membagi informasi di setiap pertemuan ADIC dapat juga dilihat sebagai sebuah keberhasilan. Kolaborasi industri pertahanan ini menjadi wadah untuk penyamaan persepsi tentang urgensi untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan di tingkat regional. Apalagi, sejak dibentuk pada tahun 2011, pertemuan ADIC selalu dilaksanakan. Ini menunjukkan bukti bahwa ASEAN berkomitmen untuk terwujudnya kolaborasi industri pertahanan.

Beberapa proposal kerjasama lain, seperti *ASEAN Defense Interaction Program (ADIP)* terkesan jalan ditempat. Sejak diinisiasikan, ADIC baru mengadakan pertemuan satu kali. Adanya pertemuan tiap tahun menunjukkan besar tidaknya komitmen negara ASEAN. Untuk menjalankan sebuah proposal kerjasama, tidak hanya dibutuhkan keseriusan dari negara anggota yang mengusulkan proposal kerjasama (*proposal proponent*

*country*), namun juga komitmen dari negara anggota yang lain. Terkadang proposal kegiatan sudah disetujui, namun sekali dijalankan, tidak ada keberlanjutan. Sebagai contoh, Thailand pernah mengusulkan diadakannya kerjasama pihak militer negara ASEAN dengan *Civil Society Organization (CSO)*, Thailand telah menggawangi kerjasama ini. Namun setelah Thailand, tidak ada lagi negara anggota yang melanjutkan kerjasama ini.

Ketertarikan negara anggota ASEAN terhadap ADIC masih tergolong tinggi, dibandingkan dengan kegiatan lain dibawah ADMM. ADIC diinisiasikan oleh Malaysia. Setelah diadakan oleh Malaysia dua kali, Myanmar kemudian menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan ADIC, kemudian dilanjutkan lagi oleh Laos. Tercatat, ADIC telah melaksanakan pertemuan 6 kali sejak dibentuknya pada tahun 2011.

ADIC dibentuk untuk mengurangi belanja senjata ASEAN ke luar, sehingga anggaran belanja ASEAN dapat dihemat. Selain itu, kolaborasi ini memberikan insentif untuk industri pertahanan di negara ASEAN untuk berkembang. Bitzinger menjelaskan bahwa produksi



persenjataan dapat juga berfungsi sebagai lokomotif dalam hal pengembangan teknologi yang menggerakkan lahirnya industri baru (Bitzinger, 2013).<sup>31</sup>Kolaborasi industri pertahanan ini dapat juga dipandang sebagai usaha untuk tidak menjadikan ASEAN hanya sebagai pasar bagi negara lain. Jika ASEAN hanya sebagai pasar, maka perlombaan senjata akan rentan terjadi. Rentannya wilayah Asia Tenggara menjadi wilayah perlombaan senjata dikarenakan Asia Tenggara kini dilirik oleh Cina sebagai kekuatan regional di Asia Pasifik, dan Amerika Serikat sebagai kekuatan global. Pendidikan dan pelatihan, kolaborasi dalam industri pertahanan, dan pertukaran teknologi sebagai kerangka kerjasama dalam ADIC akan mengurangi dilema keamanan dari tendensi setiap negara ASEAN untuk melakukan modernisasi terhadap kapasitas militernya masing-masing.

Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN memiliki karakteristik komunitas pertahanan (*defense community*). Komunitas pertahanan sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana beberapa

negara memiliki persepsi ancaman militer yang sama (*military threat*) dan saling bekerja sama untuk menangkal ancaman tersebut.

Walau petinggi militer dan pemimpin di negara ASEAN menyangkal adanya bentuk komunitas pertahanan di ASEAN, karakteristik dan bentuk kerjasama di ASEAN memberikan kesan bahwa ASEAN sedang menuju bentuk komunitas pertahanan. Salah satu bentuk kerjasama yang berkontribusi pada terbentuknya ASEAN sebagai komunitas pertahanan adalah ADIC. Kolaborasi industri pertahanan menjadi wahana bagi negara ASEAN untuk mencapai standarisasi sistem pertahanan. Standarisasi alat pertahanan nantinya akan berperan dalam mendukung *interoperability* di antara militer-militer negara anggota ASEAN. *Interoperability* sistem pertahanan negara ASEAN pada akhirnya berguna untuk menangkal ancaman dari luar yang mengancam kestabilan regional Asia Tenggara.

*Interoperability* dalam hal ini adalah *interoperability* pada level strategis. Sejatinya, *interoperability* dibagi atas

---

<sup>31</sup>Bitzinger, *Loc. Cit.*

empat level: strategis, operasional, taktis, dan level teknologi (Hura, 2000).<sup>32</sup> Industri pertahanan berhubungan langsung dengan interoperability level strategis. Hura menjelaskan:

*“National pride, the importance of each country’s military-industrial base, and to other economic considerations are part of the picture. Political costs and military risks might result from specific interoperability initiatives, which may lead to decisions not to sell or transfer the most advance systems and technologies to allies”.*

Kebanggaan nasional, kepentingan tiap negara untuk mengembangkan basis industri militernya, dan pertimbangan ekonomi merupakan hal yang menjadi perhatian dalam interoperability tingkat strategis. Hal ini yang menjadi hambatan untuk terciptanya interoperability dalam tingkat strategis. ADIC, dalam hal ini, akan menjadi wadah untuk penyamaan persepsi dan kepentingan sehingga mengurangi sikap nasionalisme yang kontra produktif.

Walau belum ada pernyataan secara langsung dari pemimpin ASEAN, keberadaan ADIC merupakan tindakan strategis yang diambil oleh negara ASEAN

untuk melakukan perimbangan kekuatan bagi regional Asia Tenggara. Hal ini didasari pertimbangan bahwa negara anggota ASEAN hampir semuanya adalah negara yang belum berkembang industri pertahanannya. Adanya ADIC mengurangi kemungkinan negara anggota ASEAN untuk terlalu bergantung pada satu kekuatan global yang justru akan mengurangi sentralitas ASEAN sebagai organisasi regional yang utuh. Pendapat ini didukung oleh temuan Aksemsettinoglu (2013):

*“ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC) jaims at providing military self-sufficiency, in two decades...[It] can be considered as an important attempt to control the major states and therefore balance their power thorough regional institutions”*

ADIC muncul sebagai wadah untuk mengimplementasikan kerjasama dalam industri pertahanan yang pada hahikatnya sensitif. Sensitifnya isu kerjasama pertahanan dikarenakan adanya bentuk kerjasama yang diinisiasikan dalam ADIC seperti *joint procurement, co-production*, dan pertukaran teknologi yang dapat

---

<sup>32</sup> Hura, M. A Broad Definition of Interoperability. Dalam M. Hura, *Interoperability: A Continuing*

*Challenge in Coalition Air Operations*, (California: Rand Corporation, 2000), pp. 7-15.

negara rentan (*vulnerable*). Kemudian ADIC berfungsi untuk meniadakan kemungkinan dari efek dari persepsi negatif pengembangan kapasitas militer sebagian besar dari negara ASEAN, terlepas pengembangan kapasitas militer tersebut untuk tujuan modernisasi atau untuk melakukan perimbangan kekuatan. Dan terakhir, ADIC menjadi wahana untuk menjadikan negara anggota ASEAN lebih terintegrasi melalui standardisasi alat pertahanan. Standardisasi ini akan mengantarkan militer negara ASEAN dalam menciptakan *interoperability* yang akan berfungsi untuk menangkal ancaman yang mengganggu stabilitas regional Asia Tenggara. Dari hal ini, maka dapat dikatakan bahwa ADIC bertindak sebagai *ways* ataupun wadah bagi negara ASEAN untuk meningkatkan rasa saling percaya (*confidence*).

Jika ASEAN ingin memainkan peran vital dalam struktur keamanan global, maka tugas utama ASEAN adalah memperat kerjasama dan memperdalam

integrasi ASEAN sebagai satu organisasi regional. Salah satu caranya adalah dengan memperkokoh kerjasama dalam industri pertahanan. Industri pertahanan tidak hanya memiliki aspek strategis, namun juga aspek ekonomi. Suplai persenjataan yang paling aman adalah suplai dari dalam negeri, sebab satu negara tidak akan terlalu bergantung pada suplai dari negara lain. Ketergantungan yang besar akan suplai senjata memungkinkan suatu negara lain untuk mendikte kebijakan negara lain. Namun karena pada kenyataannya, secara finansial dan teknologi sulit untuk mengembangkan sendiri, maka bentuk kerjasama regional dibutuhkan. Selain untuk mengurangi efek kerugian, kendala teknologi dapat diatasi dengan mekanisme spesialisasi<sup>34</sup>.

Kolaborasi industri pertahanan dalam ADIC akan bermanfaat juga dalam ranah ekonomi. Selain dapat menghemat anggaran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengembangan industri pertahanan dapat menjadi ujung tombak

---

<sup>33</sup>Aksemsettinoglu, G., "Institutional Balancing in the Asia Pacific", SBF Dergisi, 1-16., 2013.

<sup>34</sup>Integrasi dalam industri pertahanan dapat dibagi atas dua jenis, integrasi vertical dan integrasi horizontal. Proses kolaborasi dimana setiap negara memproduksi komponen produk sesuai spesialisasinya, dan kemudian dirakit sebagai

produk utuh disebut integrasi vertical. Sedangkan integrasi horizontal dimana semua negara anggota yang berkolaborasi bekerjasama untuk menghasilkan komponen atau produk utuh tanpa spesialisasi **Invalid source specified..** Namun pembahasan dalam ADIC belum sampai pada tahap ini.

dalam pengembangan, ekspansi, dan modernisasi industri pendukung industri pertahanan. Selain itu, pengembangan dan kolaborasi dalam industri jenis ini juga berfungsi sebagai lokomotif lahirnya industri baru. Dengan kemajuan dalam industri pertahanan, teknologi, ekonomi, ASEAN akan lebih memiliki posisi tawar yang baik dalam struktur keamanan global, tidak hanya sebagai wilayah dimana negara adikuasa bersaing untuk memperluas pengaruhnya. Dengan kata lain, ADIC berkontribusi untuk *institutional balancing* organisasi regional ASEAN terhadap pengaruh dari luar, khususnya di bidang industri pertahanan.

ADIC diekspektasikan akan mereduksi impor pertahanan negara ASEAN dengan memaksimalkan kolaborasi dan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Namun melihat data yang dikeluarkan oleh Stockholm International Peace Research Institute antara tahun 2011 hingga tahun 2016, kerjasama antar anggota ASEAN kurang signifikan. Memang ada beberapa kerjasama yang terjalin, namun pola peningkatan intensitas kerjasama sejak ADIC dibentuk belum dapat terlihat.

### **Kendala Dalam Implementasi ASEAN Defence Industry Collaboration**

Bentuk kerjasama apapun membutuhkan kepercayaan yang tinggi, apalagi jika kerjasama yang diinisiasikan berhubungan langsung dengan isu keamanan dan pertahanan. Di ASEAN sendiri, sengketa perbatasan menguat dan menjadi penghalang integrasi ASEAN yang lebih dalam. Tercatat, masih terdapat sebelas kasus perbatasan yang belum ditemukan solusinya oleh negara ASEAN. Kasus perbatasan seperti ini dapat sewaktu-waktu muncul ke permukaan dan mengganggu implementasi kebijakan regional. Apalagi, di masa lalu, terdapat peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan negara ASEAN satu sama lain menyimpan kecurigaan atas tindakan negara lain. Seperti pada tindakan militer Vietnam masuk ke dalam wilayah Kamboja dipandang sebagai ancaman oleh Thailand.

Hubungan antar negara ini kemudian semakin kompleks dengan adanya pemahaman bahwa *insecurity* atau rasa tidak aman diasosiasikan dengan kedekatan geografis. Negara sebagai aktor dalam hubungan internasional melihat bahwa ancaman biasanya lebih sering

muncul dari wilayah sekitarnya yang berdekatan. Negara anggota ASEAN yang memiliki proyeksi kekuatan yang terbatas cenderung memfokuskan kepentingan keamanan mereka di negara tetangga mereka.

Kemudian, gagalnya pengadopsian *Joint Communique* pada pertemuan AMM 45<sup>th</sup> memberikan kesan bahwa pemimpin negara ASEAN tidak memiliki satu suara. Dari peristiwa ini, banyak yang meragukan komitmen negara anggota dalam menyelesaikan konflik perbatasan, khususnya perbatasan yang di klaim oleh Pemerintahan Beijing di Laut Cina Selatan. Gagalnya *Joint Communique* ini memberikan alasan untuk pemimpin negara anggota ASEAN untuk tidak saling percaya.

Kemudian, dalam kolaborasi industri pertahanan, setiap negara memiliki tendensi untuk membatasi informasi atau data dalam pengembangan suatu persenjataan. Hal ini dikarenakan industri pertahanan menyangkut kepentingan nasional dan berhubungan erat dengan kapasitas militer suatu negara. Industri pertahanan memiliki karakteristik sebagai industri padat teknologi. Catatan sejarah

menorehkan bahwa keunggulan teknologi persenjataan menjadi faktor penentu hasil peperangan. Berbagi teknologi industri peperangan dalam hal ini sama saja dengan membagi keunggulan komparatif, yang berarti juga secara relatif mengurangi kapasitas militer suatu negara. Terlebih lagi, sebagian besar negara anggota ASEAN masih belum yakin sepenuhnya dalam hal berbagi teknologi atau dalam hal melonggarkan sikap proteksionis atas industri pertahanan mereka masing-masing. Adanya ketidakpercayaan dan keraguan bahwa akan tercipta hubungan resiprokal penuh (*full reciprocity*) dalam urusan sharing teknologi ini membuat negara ASEAN masih menjadi tantangan dalam kerjasama industri pertahanan ini.

Perbedaan perkembangan industri pertahanan antar negara ASEAN juga menjadi penghambat. Tercatat bahwa dari sepuluh negara ASEAN, hanya empat yang memiliki pondasi industri pertahanan yang memadai. Disparitas perkembangan industri pertahanan ini mengakibatkan negara ASEAN sulit untuk menentukan titik awal mulai dalam kolaborasi pertahanan, dimana setiap negara mampu untuk berkontribusi.

Disparitas ini muncul karena beberapa negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Umumnya, semakin baik ekonomi suatu negara tersebut, maka anggaran untuk pertahanan akan semakin besar. Kemudian, perspektif kebutuhan pengembangan industri pertahanan setiap pemerintah berbeda. Singapura, misalnya, mengembangkan industri pertahanan dalam negeri dilihat sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan perspektif *midget psychosis* mereka yang selalu merasa rentan sebagai negara kecil namun dikelilingi negara-negara besar seperti Malaysia dan Indonesia (Bitzinger, 2013), atau kasus Brunei yang tidak memiliki ancaman internal maupun eksternal, sehingga belum ada urgensi atas pengembangan industri pertahanannya (Banlaoi, 2009).

Kebiasaan untuk membeli dari luar juga menjadi salah satu faktor penghambat. Membeli langsung dari luar (*import*) secara biaya lebih murah. Sedangkan industri pertahanan adalah industri yang memiliki resiko rugi. Maka dari itu, secara ekonomi, impor persenjataan lebih menguntungkan dalam jangka pendek, apalagi jika anggaran pertahanan

dan sumber daya manusia yang terbatas. Namun hal ini mengakibatkan setiap negara ASEAN memiliki standar persenjataan berbeda, dikarenakan negara ASEAN menjalin kerjasama dengan negara yang sesuai dengan kebijakan luar negeri mereka. Standar yang berbeda menyebabkan sulit untuk menyamakan prioritas pengembangan industri pertahanan.

## Kesimpulan

### **Peran ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC) sebagai media Diplomasi Pertahanan Negara Anggota ASEAN dari tahun 2011 sampai pada tahun 2016**

Dari penjelasan dan argumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan:

1. ADIC menjadi katalis atas usaha pembentukan *confidence building measure* antara negara anggota ASEAN. Katalis dalam hal ini bermakna bahwa ADIC mempercepat pembentukan kerjasama di bidang pertahanan di ASEAN. Walaupun tidak mengikat, ADIC merupakan forum multilateral dan bersifat lebih terbuka. Disadari bahwa

sebagian besar negara anggota ASEAN masih menganggap bahwa industri pertahanan adalah sektor yang masih sangat prinsipil karena menyangkut kemampuan pertahanan suatu negara. Namun dalam hal ini, ADIC menjadi wadah bagi negara anggota ASEAN untuk saling membuka diri sekaligus memjembatani antara konsepsi proteksionisme negara terhadap industri pertahanan dengan kebutuhannya dalam bekerjasama untuk mengisi kekurangan akan sumber daya yang dimiliki.

2. Sebagai wadah untuk penyamaan persepsi atas urgensi kemandirian industri pertahanan regional. Sebagian besar negara anggota ASEAN merupakan negara pembeli alat pertahanan dari Amerika Serikat dan negara Eropa. Untuk jangka pendek, hal ini membawa keuntungan bagi negara ASEAN, sebab bergantung pada negara sendiri untuk suplai alat pertahanan membutuhkan biaya yang besar. Namun dalam jangka panjang, pola impor dari negara lain akan menjadikan negara anggota ASEAN bergantung kepada negara pengekspor alat

pertahanan, yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi politik dan ekonomi suatu negara. Pertemuan dari ADIC yang diadakan setahun menjadi wadah untuk menyamakan persepsi atas kebutuhan ASEAN untuk membentuk kerjasama pertahanan dalam tataran regional.

3. Mengurangi potensi terjadinya dilema keamanan atas tindakan peningkatan kapasitas militer. ADIC kemudian menjadi semua tempat untuk mencari titik temu antara kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan regional dan kebutuhan negara untuk meningkatkan kapabilitas militer dan pembangunan industri pertahanan tanpa menimbulkan kecurigaan antar negara dalam suatu kawasan. Pembangunan kapabilitas militer dan industri pertahanan dapat suatu negara dapat memicu negara lain untuk mengembangkan kapasitas militer mereka yang akhirnya akan mengarah pada perlombaan senjata, atau setidaknya menimbulkan kecurigaan terhadap negara tersebut. Adanya transparansi dimana setiap negara tidak lagi ragu-ragu untuk membahas dan

mempertanyakan isu keamanan akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan antar negara anggota ASEAN.

4. Kerjasama industri pertahanan dapat menjadi posisi tawar untuk negara anggota ASEAN. Tahun 2011 hingga tahun 2016, peran ADIC dapat dikatakan belum menunjukkan signifikansi yang besar. Walaupun begitu, perkembangan ADIC menunjukkan pola peningkatan yang bersifat inkremental. Hal ini ditunjukkan dengan semakin luasnya isu pembahasan dalam ADIC dan komitmen negara anggota yang tidak menunjukkan penurunan. Kedepannya ADIC dapat menjadi sebuah alternatif dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan negara anggota ASEAN sehingga tidak bergantung terhadap impor dari di luar ASEAN yang menyebabkan negara anggota rentan terhadap konsekuensi politik dan keamanan.

#### **Kendala yang dihadapi oleh negara ASEAN dalam ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC)**

Adapun yang menjadi kendala dalam implementasi *ASEAN Defense Industry Collaboration*:

1. Belum terbentuknya kepercayaan (*confidence*) yang kuat di ASEAN. Hal ini dapat dipahami dari sisi historis hubungan *emity* negara anggota ASEAN di masa lalu. Kerjasama pertahanan (*amity*) di ASEAN dikenal dengan bentuk *defense spider-web*, sebaliknya pola konflik di ASEAN memiliki pola *spider web* juga. Setiap negara memiliki sejarah konflik setidaknya dengan salah satu negara anggota ASEAN (*spider-web conflict*). Kemudian adanya fakta bahwa beberapa negara masih memiliki konflik perbatasan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Melihat pola konflik negara ASEAN yang berawal dari konflik perbatasan, maka demarkasi yang belum jelas antar beberapa negara anggota ASEAN berpengaruh terhadap pembentukan *Confidence Building Measure*.
2. Disparitas perkembangan industri pertahanan antar negara anggota. Dari sepuluh negara anggota ASEAN, hanya terdapat empat yang memiliki pondasi



industri pertahanan yang memadai dan berpotensi untuk dikembangkan. Kemudian dari empat negara tadi, Singapura merupakan negara yang memiliki industri pertahanan yang paling berkembang. Akan sulit untuk menentukan kerangka kerja dimana semua negara anggota ASEAN dapat berkontribusi di dalamnya. Ditambah lagi dengan pandangan bahwa keunggulan industri pertahanan merupakan keunggulan komparatif yang harus dijaga. Hubungan resiprokal yang idealnya akan mempermudah integrasi dan kerjasama dalam usaha pengembangan industri pertahanan akan sulit dicapai.

3. Kebiasaan beberapa negara anggota ASEAN dalam mengimpor alat pertahanan. Dari segi ekonomi, membeli alat pertahanan dari luar lebih menguntungkan. Hal ini dikarenakan mengembangkan sendiri alat pertahanan merupakan usaha yang memiliki resiko rugi yang besar. Negara anggota ASEAN kemudian mengimpor alutsista dari negara yang berbeda, yaitu negara yang sesuai dengan

kepentingan dan kebijakan luar negeri negara anggota ASEAN secara sendiri-sendiri. Hal ini mengakibatkan negara ASEAN memiliki standar persenjataan yang berbeda. Kurangnya interoperability negara anggota ASEAN dalam kepemilikan alat utama sistem pertahanan menyulitkan penyamaan prioritas pengembangan industri pertahanan.

Dalam waktu dekat ini, akan sulit bagi negara ASEAN untuk dapat menghasilkan *tangible product* dari kolaborasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ADIC akan bermanfaat bagi negara anggota, secara strategis dan ekonomi. Implementasi framework ADIC secara penuh masih membutuhkan waktu, terutama bagi negara ASEAN untuk mengatasi perbedaan dan kendala yang ada. Namun sebagai media diplomasi pertahanan, ADIC dapat dikatakan cukup berhasil. Inisiatif pertemuan masih terus berlanjut tiap tahun sejak dibentuknya ADIC pada tahun 2011. Antusiasme negara anggota ASEAN terlihat tinggi untuk ADIC dibanding negara inisiasi kegiatan lain yang berada di bawah payung ADMM.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Balakrishnan, K., & Bitzinger, R. A. 2012. *ASEAN Defense Industrial Collaboration: Getting to Yes*. Singapore: Rajaratnam School of International Studies.
- Banlaoi, R. C. 2009. Globalization's Impact on Defence Industry in Southeast Asia. Dalam G. Till, E. Chew, & J. Ho, *Globalization and Defence in the Asia-Pacific: Arms Across Asia* (hal. 197). New York: Routledge.
- Basrowi, & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buzan, B., & Weaver, O. 2003. *Regions and Power: The Structure of International Security*. New York: Cambridge University Press.
- Dunne, J. P. 2009. *Development in the Global Arms Industry from the End of the Cold War to mid-2000s*. Dalam R. A. Bitzinger, *The Modern Defense Industry* (hal. 12). California: ABC-CLIO, LLC.
- Hartanto, A. 2013. *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hura, M. 2000. *A Broad Definition of Interoperability*. Dalam M. Hura, *Interoperability: A Continuing Challenge in Coalition Air Operations* (hal. 7-15). California: Rand Corporation.
- Matthews, R., & Maharani, C. 2009. *The Defense Iron Triangle Revisited*. Dalam R. Bitzinger, *The Modern Defense Industry* (hal. 48-59). California: ABC-CLIO.
- Neuman, S. G. 2009. *Power, Influence, and Hierarchy: Defense Industry in a Unipolar World*. Dalam R. A.

Bitzinger, *The Modern Defense Industry: Political, Economic, and Technological Issues* (hal. 61-94). California: ABC-CLIO.

- Sutanto, L. 2013. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Universitas Pertahanan Indonesia. 2014. *Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penulisan Karya Akhir Studi Universitas Pertahanan*. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Wahyuni, S. 2011. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Selemba Empat.
- Widjayanto, A., Prasetyo, E., & Keliat, M. 2012. *Dinamika Persenjataan dan Revitalisasi Industri Pertahanan*. Jakarta: UI-Press.

### Jurnal

- Aksemsettinoglu, G. 2013. "Institutional Balancing in the Asia Pacific". *SBF Dergisi*, 1-16.
- Bitzinger, R. A. 2013. "Revisiting Armaments Production in Southeast Asia: New Dreams, Same Challenges". *Contemporary Southeast Asia*, 35, 369-394.
- Zulfaqar. 2010. "ASEAN Defense Industry Collaboration". *Jurnal ASIA Pertahanan dan Keselamatan*, 1-4.

### Laporan

- ASEAN. 2012. *ASEAN Annual Report 2011-2012: Evolving Toward ASEAN 2015*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

### Wawancara

- Astrini, R. (2016, December 16). *Transkrip Wawancara V*. (Z. Dilahwangsa, Pewawancara)

## Website

ASEAN Defense Minister's Meeting. 2011, April 27. *ASEAN Defence Ministers' Meeting: Concept Paper on Establishing ASEAN Defence Industry*. Diambil kembali dari <https://admm.asean.org>: <https://admm.asean.org/dmdocuments/12.%20ANNEX%2010-%20Concept%20Paper%20on%20Establishing%20ADIC.pdf>

CSIS. 2011, Juli 9. *ASEAN Defense Industri Collaboration*. Diambil kembali dari [www.csis.org](http://www.csis.org): <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-xoPWqMHOAhVMKo8KHUOCAAsQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.csis.org%2Fanalysis%2Fdiig-current-issues-no-25-asean-defense-industry-collaboration&usg=AFQjCNFk5pS1Pacu9U>

Santosa, I. N. 2011, Mei 19. *Malaysia, Indonesia pace ASEAN military industry*. Diambil kembali dari [www.thejakartapost.com](http://www.thejakartapost.com): <http://www.thejakartapost.com/news/2011/05/19/malaysia-indonesia-pace-asean-military-industry.html>

Tomotaka, S. 2013, Desember 14. *ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) and ADMM Plus*. Diambil kembali dari <http://www.nids.go.jp>: [http://www.nids.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2013/bulletin\\_e2013\\_2.pdf](http://www.nids.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2013/bulletin_e2013_2.pdf)

